

TIDAK ADA PEMBATASAN PERGERAKAN WARGA LUAR SLEMAN

PSBB, Pemkab Pilih Terapkan WFH 50 Persen

SLEMAN (KR) - Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 11-25 Januari mendatang untuk Jawa-Bali yang di-canangkan pemerintah pusat diharapkan bisa menekan kasus Covid-19. Apalagi saat ini wilayah Sleman sudah masuk kriteria untuk dilakukan pembatasan secara ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, dari rapat koordinasi yang telah dilakukan, kuota pegawai yang akan bekerja di kantor atau *work from home* (Wfh) hanyalah 50 persen. Hal

ini menyesuaikan kondisi di daerah di mana Pemkab Sleman saat ini memiliki jumlah pegawai yang sangat terbatas. "Jika nantinya hanya mengerahkan 25 persen pegawai yang ada di kantor, dikhawatirkan akan

mengganggu pelayanan publik," tuturnya di Sleman, Kamis (7/1). Menurut Harda, dalam hal pelayanan publik, pihaknya benar-benar membutuhkan orang-orang untuk melayani. "Kami banyak yang pensi-

un, sehingga formasi tidak lengkap," jelasnya. Selama pemberlakuan PSBB ini, Pemkab Sleman juga akan membentuk posko pembatasan ketat yang berada di Ruang Sembada Setda Sleman. Posko ini akan diaktifkan dari 11-25 Januari 2021. Posko juga akan dibentuk di tingkat Kapanewon dan Kalurahan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menjelaskan, saat ini di Kabupaten Sleman memiliki kriteria

angka kesembuhan di bawah nasional yakni hanya 78 persen dari 82 persen. Sedangkan angka kasus aktif Sleman di atas nasional yakni mencapai 19,58 persen. Serta ketersediaan bed yang sudah hampir penuh. "Ketersediaan bed saat ini untuk noncritical sudah terisi sebanyak 74,5 persen dan bed critical terpakai 90,92 persen. Sebelum instruksi PSBB ini keluar, Pemkab Sleman sudah bekerja keras untuk menangani pande-

mi Covid-19. Kalau penanganan pandemi hanya dilakukan di hilir, maka pemerintah daerah akan merasa kesulitan. Dengan adanya PSBB, maka penanganan akan dilakukan mulai dari hulu. Sehingga kalau hulu dikendalikan, kita berharap hilir bisa terkelola dengan baik," tegas Joko. Setelah diberlakukan kebijakan ini, nantinya semua kegiatan seperti perkantoran, wisata, hajatan, tempat ibadah, acara sosial kemasya-

rakatan, pusat perbelanjaan dan sebagainya akan diatur melalui instruksi Bupati Sleman. Namun demikian, dimungkinkan tidak ada pembatasan masyarakat luar Sleman yang hendak masuk wilayah Sleman. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja di luar Sleman dan begitu pula sebaliknya. "Namun ada kemungkinan pembatasan untuk masyarakat dari wilayah DIY yang akan masuk," tandas Joko. **(Aha)-f**

Jembatan Selopamioro Terancam Runtuh



KR-Sukro Riyadi

Kondisi talut sisi timur jembatan Selopamioro yang ambrol, Kamis (7/1).

BANTUL (KR) - Talut penyangga jembatan di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri runtuh. Jembatan tersebut terancam ambrol pertengahan tahun lalu setelah air menggerus bangunan sisi utara. Melihat kondisi seperti itu, warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar jembatan tidak membahayakan. Sedangkan kendaraan hanya bisa melintasi jembatan sisi selatan dengan bergantian.

warga. "Hampir semua sektor tergantung dengan jembatan disebut. Setelah talut sisi utara runtuh kemudian dibangun jalan darurat dan Pemda DIY menganggarkan pembangunan jembatan tersebut tahun 2021," ujar Sugeng.

Anggota Komisi C DPRD DIY, H Amir Syarifudin, mengatakan runtuhnya talut jembatan tersebut hanya satu dari persoalan di sana. Sebelumnya pernah roda truk terperosok di tengah jembatan dan itu tak hanya sekali. Tapi memang penanganan darurat tersebut mestinya tidak dilalui kendaraan berat.

Lurah Kalurahan Selopamioro Imogiri Bantul, Sugeng, Rabu (7/1), mengungkapkan jembatan tersebut menghubungkan Yogyakarta-Panggang Gunungkidul dan punya peran sangat strategis untuk menopang aktivitas

Oleh karena itu PU ESDM DIY dan Komisi C DPRD DIY sepakat pem-

bangunan jembatan di Selopamioro harus disegerakan. Harapannya lelang tahun 2021 ini bisa lancar dan segera dilaksanakan pembangunannya. "Kemarin Pak Lurah Selopamioro sudah menanyakan, Bu Camat Sri Kayatun juga sudah menanyakan. Mereka khawatir jika sampai putus semua sektor bakal terganggu," ujarnya. Amir mengungkapkan, sebelumnya jembatan tersebut terancam runtuh setelah konstruksi bagian bawah terus digerus air. Selanjutnya Pemda DIY berusaha melakukan penanganan darurat. Namun usaha tersebut tidak berjalan mulus, sisi utara kembali runtuh setelah tidak kuasa menahan derasnya air. **(Roy)-f**

BEDAH KISI-KISI BARENG ULTRA DI PAKEM Pastikan 635 Peserta Siap Hadapi Ujian

PAKEM (KR) - Mendorong peningkatan prestasi pada Ujian Sekolah Daerah (USDA) Sekolah Dasar (SD) 2021, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kapanewon Pakem menggelar Bedah Kisi-kisi USDA bersama Ultra di SDN Pakem 1, Rabu (6/1).

dirkan narasumber berkompeten tersebut. Mereka pun fokus mendedikasikan pemaparan materi menarik mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dari narasumber.

guru membutuhkan pendalaman materi untuk nantinya diberikan pada siswa di 26 SD.

Sedikitnya 78 guru SD kelas VI di Kapanewon Pakem terlibat dalam acara yang mengha-

Ketua K3S Kapanewon Pakem Drs Sunaryo menegaskan tahun 2021, sedikitnya 635 siswa SD di Kapanewon Pakem bakal menempuh ujian tahun 2021. Karenanya,

"Dari total 26 SD, ada peserta ujian sebanyak 635. Dari bedah kisi-kisi ini, kami berharap ada peningkatan prestasi nantinya. Materi menarik yang disampaikan narasumber bisa jadi bekal untuk diberikan pada murid-murid," kata Sunaryo. **(Yud)-f**



KR-Antri Yudiandiyah

Guru SD kelas VI di Kapanewon Pakem mendengarkan materi dari narasumber.

LAKUKAN VAKSINASI COVID-19

34 Fasilitas Layanan Kesehatan Disiapkan

BANTUL (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyatakan siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Adapun kesiapan dilakukan dengan memastikan 34 fasilitas layanan kesehatan siap untuk melakukan vaksinasi.

klinik ditunjuk Klinik Pratama Polres Bantul.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bantul, Abednego Dani Nugroho, Kamis (7/1), menuturkan pihaknya sudah menyiapkan 34 fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Adapun pelayanan kesehatan tersebut terdiri 27 Puskesmas dan beberapa rumah sakit seperti RSUD Panembahan Senapati dan RSPAU Hardjolukito.

"Saat ini seluruh tenaga medis di 34 fasilitas layanan kesehatan sedang mengikuti pelatihan pemberian layanan vaksinasi. Meski sudah terbiasa melakukan vaksinasi, namun untuk vaksin Covid-19 tetap mendapatkan pelatihan. Pelaksanaannya dibawah pengawasan BPJS. Karena penerima vaksin dan pemberi layanan tercatat by name sehingga pemberian vaksin dipantau secara online," jelasnya.

Untuk rumah sakit swasta, RS PKU Muhammadiyah Bantul, RS Santa Elisabeth, RS UII dan RS Nurhidayah. Sedangkan untuk

Vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Berdasarkan data di Bantul ada sekitar 6.323 tenaga kesehatan yang akan mendapatkan prioritas vaksin. "Sementara untuk pemberian vaksinasi pejabat di lingkungan Pemkab Bantul mulai dilaksanakan (14-15/1). Ini berdasarkan hasil video conference dengan Kemendagri beberapa waktu lalu,"

tambahnya.

Terpisah, Sekda Bantul yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19, Helmi Jamharis, menambahkan Pemkab Bantul sudah siap melaksanakan program vaksinasi. Pihaknya memastikan berdasarkan informasi terakhir vaksin Covid-19 sudah sampai di DIY. Sehingga siap didistribusikan ke 5 kabupaten/kota di DIY.

Sambil menunggu proses distribusi, Gugus Tugas Covid-19 akan melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Terkait dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya Kabupaten Bantul siap melaksanakan vaksinasi. Pemberian vaksin memiliki tujuan memberikan kekebalan terhadap virus sehingga pihaknya mengimbau masyarakat tak perlu khawatir terkait vaksinasi," jelasnya. **(Aje)-f**

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id



Berlangganan
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.